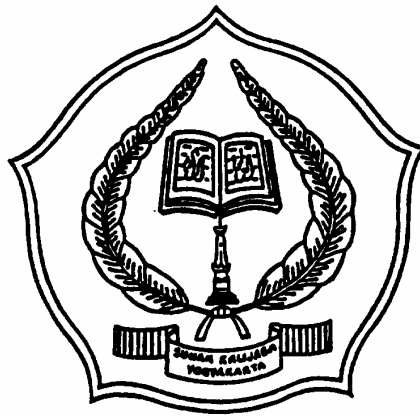


**KEPEMIMPINAN MILITERISME DALAM SEBUAH NEGARA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA
TERHADAP KEPEMIMPINAN NEGARA RI**

**(STUDY ANALISIS PRAKTEK KEPEMIMPINAN NEGARA ISLAM
MASA NABI MUHAMMAD SAW DAN MASA AL-KHULAFURRASIDUN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 03370296

PEMBIMBING

1. Prof. Drs. H. AKH. MINHAJI, MA., Ph.D
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
JINAYAH SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Membawa masyarakat dan negara kedalam kesejahteraan, keamanan tanpa ancaman, dan kebebasan menyeluruh adalah tujuan pemimpin negara dalam melaksanakan tujuan proses kepemimpinannya. Semuanya akan bisa tercapai bila seorang pemimpin negara mampu bertindak dan bersikap efektif bagi masyarakat dan negaranya. Apapun bentuk dan sistem pemerintahannya, negara membutuhkan figur seorang pemimpin yang memenuhi syarat pemimpin yang cakap dan tangguh. Hal ini memberi motivasi terhadap praktek-praktek kepemimpinan negara militerisme. Karena faktor dan alasan tertentu seorang pemimpin negara mampu mengaplikasikan kepemimpinannya secara militerisme di dalam negara yang bukan dalam bentuk dan system militeristik.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara pemerintahan Islam masa nabi Muhammad SAW dan al-khulafaurrasidun, pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan militerisme dalam Negara Islam atau secara umum dan mencari relevansi kepemimpinan militerisme dalam kepemimpinan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selama ini kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara mempunyai kecenderungan terhadap praktek-praktek kepemimpinan diktator dan penggunaan budaya kekerasan (perang). Maka kerangka teoritik skripsi ini mengacu bahwa dalam Islam mengharuskan seorang pemimpin negara untuk bertindak adil dan efektif dalam tindakan, kebijakan dan keputusan-keputusan negaranya. Al-Mawardi menyebutkan bahwa seorang pemimpin mempunyai kewajiban atas kesejahteraan rakyatnya baik secara material maupun secara spiritual. Hal itu dikuatkan oleh pendapat Ibnu Taimiyah bahwa seorang pemimpin negara harus pemberani, cakap, adil dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subyektif apapun. Bila seorang kepala Negara menyeru akan perang maka jihad menjadi fardh 'alal kifayah, tetapi apabila musuh menyerang jihad menjadi fardhul 'aini

Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, hal ini bisa diteliti sejauh mana kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara masa pemerintahan nabi Muhammad SAW dan al-khulafaurrasidun, dengan prinsip perang dan dominasi militernya. Karena demi membela dan mempertahankan bangsa – negaranya dari ancaman dan rongrongan kekuatan musuh, perang menjadi pilihan akhir penyelesaiannya. Sehingga melalui pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara secara umum masih sangat bersebrangan dengan idealisme dan konsep kepemimpinan negara Islam atau NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang menganut prinsip demokrasi. Sedangkan relevansi kepemimpinan militerisme dalam Negara Islam perlu di perhatikan dan pertimbangkan sesuai dengan alasan, faktor dan konteks yang ada dalam NKRI.

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Khusnul Khotimah

Kepada
Yth. Bapak
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 03370296

Judul : Kepemimpinan Negara Militerisme Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Negara RI (Study Analisis Praktek Kepemimpinan Negara Islam Masa Nabi Muhammad dan Al-Khulafa'urra'idun)

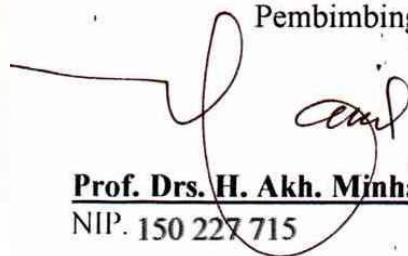
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2007
21 Dzulhijjah 1428

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

NIP. 150 227 715

Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Khusnul Khotimah

Kepada
Yth. Bapak
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 03370296

Judul : Kepemimpinan Negara Militerisme Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Negara RI (Study Analisis Praktek Kepemimpinan Negara Islam Masa Nabi Muhammad dan Al-Khulafa'urra'idun)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2007
21 Dzulhijjah 1428

Pembimbing II



Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KEPEMIMPINAN MILITERISME DALAM SEBUAH NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEPEMIMPINAN NEGARA RI

(STUDY ANALISIS PRAKTEK KEPEMIMPINAN NEGARA ISLAM
MASA NABI MUHAMMAD SAW DAN AL-KHULAFURRASIDUN)

Disusun Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 03370296

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis 17 Januari 2008 M. / 8 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Januari 2008 M.
8 Muharram 1429 H.



Dekan Fakultas Syari'ah,

Drs. H. Indan Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Pembimbing I

Prof. Drs. H. AKH. Minhaji, MA., Ph.D.
NIP. 150 227 715

Penguji I

Prof. Drs. H. AKH. Minhaji, MA., Ph.D.
NIP. 150 227 715

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Penguji II

Drs. H. Abd. Madjid AS
NIP. 150 192 830

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	‘illah

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ā</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>tansā</i>
		ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
		ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لأن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya:

الفروض ذوري السنة اهل	ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
--------------------------	--------------------	--

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Almamaterku Kampus Putih UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ *Kedua orang tuaku Bapak
Musnaini dan Ibu Mujilah tercinta
terimakasih atas kasih sayang do'a
dan munajatnya.*

MOTTO

"Jangan kau kira harimau yang menunjukkan giginya itu sedang tersenyum padamu dan harimau yang menyeringai itu sedang marah padamu".

KATA PENGANTAR

الحمد لله العليم الحكيم الذى يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا
أشهدان لا اله الا الله وأشهدان محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى
الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . اما بعد

Kupanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta taufiq-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW. serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Persoalan kepemimpinan Negara merupakan persoalan hak dan tanggung jawab antara yang berkuasa (kepala Negara) dan yang di kuasai (warga Negara) yang tidak ada hentinya untuk didiskusikan. Hal ini menunjukkan kompleksitasnya permasalahan tersebut. Sejauh ini pembahasan tentang kepemimpinan Negara atau khilafah ataupun imamah selalu melahirkan premis pemimpin yang adil, bijak, professional, efektif dan efisien.

Oleh karena itu, skripsi yang berjudul “KEPEMIMPINAN MILITERISME DALAM SEBUAH NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEPEMIMPINAN NEGARA RI (Study Analisis Kepemimpinan Negara Islam Masa Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafa’ar-rasidun)”, ini di harapkan mampu menjadi wacana alternatif dari berbagai wacana selama ini yang berkembang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, kawan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs.Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, dan segenap jajaran universitas dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Mahrus Munajad, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan pembimbing akademik, yang dengan kesabaran, kebijaksanaan dan rasa tanggung jawabnya telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti selama menjalani perkuliahan dan hingga terselesainya tugas akhir akademik ini .
3. Bapak Prof. Drs. H.Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu memberikan waktu dan kesempatan serta ilmunya kepada penyusun untuk melakukan bimbingan dan konsultasi serta memberikan pengarahan dengan sungguh-sungguh demi suksesnya panyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu memberikan waktu dan kesempatan serta ilmunya kepada penyusun untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi serta memberikan pengarahan demi suksesnya penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku yng tercinta, Bapak Musnaini dan Ibu Mujilah, kakakku Rofi'i, dan saudara-saudaraku tersayang, yang tiada hentinya memberikan limpahan moril dan materiil serta kasih sayang dan motivasi yang tiada hentiya sehingga terselesainya karya tulis ini.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabat baikku "Sor Blimbing Community" Asrama Al-Hidayah semuanya, yang sudi menjadi keluarga, yang telah memberi warna baru, support, do'a dan keceriaan yang tak akan penyusun lupakan.
7. Teman-teman di JS 1 dan 2 '03 semuanya, yang telah memberi inspirasi, semangat dan tantangan baru bagi penyusun selama ini.
8. Dan semua pihak , teman-teman yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukunganya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga bagi yang mau mengambil manfaat darinya.

Wassalam.

Yogyakarta, 31 Desember 2007 M
21 Dzulhijjah, 1428 H

Penyusun

Khusnul Khotimah
Nim : 03370296

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM MILITERISME DAN KEPEMIMPINAN	
 MILITERISME DALAM SEBUAH NEGARA	
A. Militerisme Secara Umum	21
1. Sejarah Militerisme	21

2. Pengertian Militerisme	24
3. Kriteria dan Unsur-unsur Militerisme	26
4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Militerisme	29
B. Kepemimpinan Militerisme Dalam Sebuah Negara	34
1. Kriteria dan Unsur Kepemimpinan Militerisme dalam Sebuah Negara	36
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kepemimpinan Militerisme dalam Sebuah Negara	38
 BAB III PRINSIP KEPEMIMPINAN MILITERISME DALAM NEGARA ISLAM	
A. Konsep Kepemimpinan Negara dalam Islam.....	39
B. Kepemimpinan Militerisme dalam Negara Islam	43
1. Kepemimpinan Militerisme dalam Negara Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW.....	44
2. Masa Pemerintahan al-Khulafaurrasidun (11-40H).....	48
a. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H)	48
b. Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H).....	52
c. Khalifah Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib (23-40 H).....	58
C. Kriteria dan Unsur Kepemimpinan Militerisme dalam Negara Islam	59
D. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kepemimpinan Militerisme dalam Negara Islam	61

BAB IV ANALISIS PRAKTEK KEPEMIMPINAN MILITERISME

DALAM SEBUAH NEGARA

A. Kepemimpinan Militerisme dalam Sebuah Negara Menurut Fiqh Siyasah	63
B. Dampak Kepemimpinan Militerisme	70
C. Relevansi Kepemimpinan Militerisme dalam Kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	III
3. Peta Kekuatan Politik.....	VII
4. Struktur Pemerintahan yang Disederhanakan	VIII
5. Daftar Singkatan.....	IX
6. Curriculum Vitae.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjalanan sejarah yang eksentrik, meninggalkan catatan-catatan kecil yang sangat menarik untuk dipelajari kembali seiring perkembangan tata kepemimpinan negara dan pemerintahan dari periode ke periode, dari dekade ke dekade, mempunyai ciri khas gaya kepemimpinan. Suatu negara tertentu dengan sistem pemerintahan tertentu ternyata mampu mengekspresikan praktek kebijakan maupun realita politik yang sama sekali berbeda, kadang menyimpang bahkan bertentangan dengan tata dan sistem ideal mereka. Negara dengan bentuk negara republik dan sistem pemerintahan yang demokrasi bisa mengusung dan memberi fenomena militeristik.¹

Sedikit kita menengok ke belakang dalam sejarah kepemimpinan negara Indonesia dari periode Soekarno misalnya, dengan basic sipilnya yang berjorgan nasionalisme-demokrasi², ternyata telah meninggalkan kontroversial diseputar model kepemimpinan Soekarno, namun pada ujungnya telah melahirkan sejumlah penilaian permissive, sebagai rezim antagonis yang

¹ Militeristik sebagai wujud sebuah ideologi politik yang sering menghadirkan sejumlah paradoks dan antagonisme, karena sering diasosiasikan sebagai perwujudan dari perilaku kekerasan. S. Kirbiantoro, Dody Rudianto, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia; Nasionalisme – Islamisme – Komunisme – Militerisme*, (Jakarta : Intermedia Publisher, 2006), hlm. 65.

² Ada yang mengidentikan nasionalisme dengan patriotisme, dalam konteks politik, nasionalisme adalah menegakkan kekuasaan negara dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan berbangsa dalam kehidupan negara yang berdaulat, *ibid.*, hlm. 15. Sedangkan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan konsep dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat atau bisa disebut sebagai pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 246.

otoriter dan memunculkan sebuah stigma yang traumatis, menenggelamkan perjuangan hak-hak azasi manusia dan demokrasi.³ Kemudian lahirnya orde baru yang semula ditafsirkan sebagai tonggak monumental hadirnya sebuah harapan baru. Kepemimpinan negara yang dipegang oleh Soeharto yang mempunyai *background* militer ternyata benar-benar menjadi suatu realita negara demokrat menjadi wujud negara Indonesia dengan seorang pemimpin yang militerisme. Sistem komando otoriterisme, bahkan secara abstrak menjadi totalitarianisme⁴, sebagai alternatif nyata tata pemerintahan NKRI dalam waktu dan warna yang cukup fantastik. Hal itu kemungkinan sebagai suatu pilihan solusif dalam menghadapi situasi yang kaotik. Dimana memberi legitimasi bagi tampilnya figur dan tokoh sosok kuat (*strong man*) yang akan mampu mengatasi kekacauan dengan bertindak kekerasan dan otoriter.

Sedangkan pada masa-masa kepemimpinan setelahnya (Soeharto),, mulai dari BJ. Habibie, Gus Dur, Megawati, merupakan masa-masa transisi yang tidak lama menduduki kursi kepresidenan. Dimana masa-masa tersebut khususnya pemerintahan Habibie lebih terdominasi oleh warisan kepemimpinan Soeharto. Secara tidak sengaja figur-figur kepemimpinan dari rezim sipil kesemuanya belum mempunyai kesempatan dan masa menjabat yang terhitung cukup singkat. Karena di bawah pemerintahan dan kepemimpinan figur sipil tidak mampu dan tuntas menangani program-program transisi yang seharusnya lebih bisa mewujudkan kesejahteraan

³ S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia.*, hlm. 93.

⁴ Indrayana "Militansi," *Kompas*, No.154,Th.ke-42 (Sabtu, 2 Desember 2006),hlm.6

masyarakat sipil. Gagasan reformasi tidak tersosialisasikan dengan baik di tingkat implementasinya. Komando kerja sering tidak jelas, demikian juga daya dukung sarana operasional – personal pelaksana tidak memadai sehingga mudah terjadi ketimpangan hasil kerja.⁵

Sampai pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini presiden RI yang diperhitungkan sebagai figur militer membawa misi-ideologi militer sendiri. SBY mencoba menghapus citra militernya dengan berubah haluan, menciptakan dirinya sebagai seorang sipil tulen. Tiap kali pengambilan keputusan maupun pendelegasian pelaksanaan tugas-tugas rumit dengan tidak menggunakan basis militerismenya. Padahal hal tersebut hanya bisa tuntas ditangani dengan visi militerismenya.⁶ Sedangkan dalam kebijakan lainnya yang seharusnya didasarkan pada konsep pemikiran demokrasi, SBY memberi kebijakan sepihak dengan satu alasan *demand* presiden yang dominan praktek militerismenya, sehingga dalam masa kepemimpinan SBY yang secara ideal ingin menghilangkan citra militernya dari basic yang militer, ternyata dalam suatu kondisi tertentu maupun kesempatan yang ada militerisme tetap seringkali memberi *colour* model pemerintahannya.

Dari pengalaman-pengalaman di atas dapat penulis analisa bahwa ternyata kepemimpinan basic sipil ataupun militer sendiri, keduanya sama-sama mempunyai kemungkinan untuk terjadinya proses kepemimpinan negara yang militeristik. Dari orang sipilpun bila praktek pemerintahannya

⁵ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik; Dulu, Kini dan Kelak*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 274.

⁶ S. Kirbiantoro, *Pergulatan Partai Politik.*, hlm. 103.

memprioritaskan dan terdominasi oleh visi-misi militer bisa menjadi militerisme yang akhirnya akan menjadi militeristik. Apalagi dengan tokoh militer yang tetap menganggap kepemimpinannya dalam ranah pemerintahan dan negara seyogyanya konsep jenderal kepada bawahan, ideologi militernya menjadi pokok pikiran dalam memimpin sebuah negara. Jelas militerisme akan selalu dirasakan oleh rakyat dan menjadi fenomena yang imajinatif. Tapi adakalanya kepemimpinan militerisme dalam kondisi dan situasi tertentu memang dibutuhkan dan wajib direalisasikan oleh seorang pemimpin baik dalam rezim sipil maupun militer.⁷

Fenomena-fenomena di atas kemungkinan masih banyak akan kita jumpai pada masa-masa kepemimpinan negara Indonesia berikutnya khususnya, ataupun negara-negara di dunia pada umumnya dimasa-masa ataupun periode-periode yang akan datang, baik dalam negara sekuler ataupun khilafah Islamiah (negara Islam). Tapi di sini penulis akan lebih fokus mengkaji dan meneliti bagaimana konsep dan praktek kepemimpinan negara militerisme dalam sejarah negara Islam.

Pemerintahan nubuwah dengan Muhammad sebagai kepala negara dan pemerintahan, di samping sebagai pemimpin umat beragama (Islam). Sebagai seorang panglima perang (amir)⁸ yang secara sentral proses ketatanegaraannya dan pemerintahannya dengan segala kebijakan-

⁷ Martin Shaw, *Bebas dari Militer, Analisis Sosiologi atas Kecenderungan Masyarakat Modern*, terjemahan dari Post Military Society, *Militerism, Demilitarization and War at the End of the Twentieth Century*, alih bahasa Imam Baihaqie, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 14.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 92.

kebijakannya langsung dari komando Nabi sendiri. Nabi berhak mengeluarkan anggota-anggota perjanjian yang dianggap tidak menepati janji dan kesepakatan, memberi sanksi serta menginstruksi perang atau pernyataan damai.⁹ Namun demikian, semua berjalan dengan lancar, damai dan penuh keadilan. Hak azasi yang selalu dijunjung tinggi, perbedaan selalu dihormati, persamaan hak rakyat selalu terbagi serta pengakuan hak-hak wilayah di luar Islam yang selalu dilindungi, sehingga terbentuk suatu *nation state of Arabs* yang damai dan sejahtera. Begitu juga dalam masa pemerintahan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi masih mewarisi karakteristik pemerintahan Nabi, namun peristiwa pembantaian orang-orang *murtadin* (orang-orang Islam yang keluar dari agama Islam).¹⁰ cukup menjadi pertimbangan karakter kepemimpinannya

Dalam pemerintahan Umar pun ada suatu kasus yang menarik yang dapat menambah data dalam kajian ini, karena kepribadian Umar yang memang keras dan disiplin hal itu bisa berakibat cukup pragmatis dan praktis. Lihat ketika Umar bin Khattab menghukum mati anaknya sendiri karena mabuk-mabukan dan berkata amoral, dan karena ledakan amarah juga, Umar memukul seorang desa yang datang kepadanya untuk memohon pertolongan dari seorang yang menzaliminya, kemudian Umar bertaubat dan meminta

⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 15.

¹⁰ Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan negara dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang *riddah* (perang melawan kemurtadan). Lihat, Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

orang desa itu untuk balas memukulnya tapi orang desa itu menolak. Lalu

Umar pergi ke rumahnya sambil mengucapkan ratapan berikut :

“Wahai putra Al-Khatab ! kau hina dan Allah telah meninggikanmu, engkau tersesat dan Allah telah menuntunmu, kau lemah dan Allah memberiku kekuatan, lalu Dia telah menjadikanmu berkuasa atas leher manusia dan ketika salah seorang di antara mereka datang meminta pertolonganmu, kau justru memukulnya ! Apa yang harus kau katakan kepada Tuhanmu ketika kau berdiri dihadapanNYA”.¹¹

Dari beberapa data di atas cukup menjadi hipotesa awal, yang kemudian akan penulis teliti lebih lanjut tentang kepemimpinan negara militerisme. Apakah data-data di atas dapat dimasukkan sebagai kategori kepemimpinan negara yang mempunyai unsur-unsur militerisme atau bahkan tidak dan bukan sama sekali ? yang yang menjadi obyek utama penulis adalah praktek kepemimpinan negara Islam khususnya masa Nabi Muhammad SAW dan masa al-Khulafaurrasidun.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang kemudian menjadi pembahasan dalam bentuk skripsi tentang kepemimpinan negara militerisme, sebuah model kepemimpinan yang mempraktekkan konsep-konsep militeristik di dalam pemerintahan yang tidak menggunakan sistem pemerintahan militeristik itu sendiri. Selanjutnya bagaimana model kepemimpinan militerisme harus dipraktekkan atau tidak sama sekali, kemudian yang lebih spesifik lagi akan dianalisis menurut pandangan fiqh siyasah yang berkembang serta relevansinya di Negara Kesatuan Republik

¹¹ Tulisan Ibn Al-Atsir dalam Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dkk., (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002), hlm. 219.

Indonesia yang sedang menjalankan pemerintahan demokrasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan menjadi bahasan dan sentral pemikiran kita nanti, yakni :

1. Bagaimana kepemimpinan militerisme dalam Negara Islam masa nabi Muhammad SAW. dan al-khulafaurrasidun ?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan militerisme dalam sebuah negara?
3. dan Bagaimana relevansi kepemimpinan militerisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara
2. Untuk mengetahui kepemimpinan militerisme dalam Negara Islam masa nabi Muhammad SAW. dan al- khulafaurrasidun?
3. Menemukan relevansi kepemimpinan negara militerisme dalam kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan substansi pemikiran bagi perkembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan politik Islam pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perkembangan politik Islam.
3. Secara pribadi karya ini menjadi awal dalam menapaki dunia karya ilmiah.
4. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas tentang politik Islam terutama mengenai model kepemimpinan suatu negara dan pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Diskursus kepemimpinan negara dalam suatu tata pemerintahan, telah sejak lama masuk menjadi pembahasan oleh para pemikir politik baik di dalam maupun di luar negeri, karenanya yang menulis model-model kepemimpinan negara baik dalam tata pemerintahan Islam ataupun tata pemerintahan global, secara konseptual, sejarah maupun empiris dengan pendekatan sosiologis relatif mengesankan. Tetapi karya tulis tentang kepemimpinan negara militerisme yang dikaitkan dengan kepemimpinan negara dalam tata pemerintahan Islam, sejauh pengamatan penulis belum ditemukan. Namun demikian telah ada karya tulis yang membahas tentang militerisme dalam kancah perpolitikan dan tata pemerintahan di antaranya : Amor Parlmutter dan P. Hutingtion, dalam bukunya dia menulis tentang peran militer dalam politik bagaimana posisi militer sebagai alat negara atau alat

kekuasaan dalam judul *Politik dan Militer*.¹² Demikian juga dengan buku tentang *Militerisme dan Anti Militerisme* yang dikarang oleh Karl Liebnicht¹³, di sini membahas secara global semua bidang yang mengandung konsep militerisme tidak dalam kepemimpinan negara sendiri. Kemudian Salim Said juga menulis tentang *Militer Indonesia dan Politik – Dulu, Kini dan Kelak*.¹⁴ Dalam buku ini Salim sebagai figur militer dan banyak pengalaman dalam lembaga militer, dia menekankan pada aspek kelembagaan militer sendiri, figur-figur militer yang mempunyai peran penting dalam tata pemerintahan Indonesia sebagai kepala negara tentunya. Bahkan tentang hubungan sipil dan militer dalam pusaran demokrasi yang mengeksplorasikan antara sipil dan militer dalam pemerintahan demokrasi terutama dalam konteks ke Indonesiaan.

Ditemukan dalam tulisannya Arif Yulianto dalam buku yang berjudul *Hubungan Sipil dan Militer dalam Pusaran Demokrasi*.¹⁵ Masih banyak buku-buku dan karya-karya ilmiah tentang militerisme contohnya Run Aly, *Mengulang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter*¹⁶, Erick A Nordliyer, *Militer*

¹² Amor Parlmutter dan P. Hutiontion, *Militer dan Politik*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004).

¹³ Karl Liebnicht, *Militerisme dan Anti Militerisme*, alih bahasa Pius Tumangger dkk., (Yogyakarta : IRE, 2005).

¹⁴ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik; Dulu, Kini dan Kelak*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006).

¹⁵ Arif Yulianto, *Hubungan Sipil dan Militer dalam Pusaran Demokrasi*, Yogyakarta : Insist Press, 2000).

¹⁶ Run Aly, *Mengulang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter*, (Jakarta : Kompas, 2004).

*dan Politik*¹⁷, Rudini, et.al., *ABRI dan Kekerasan*¹⁸, serta tulisan-tulisan dalam bentuk artikel adalah I Nyoman Mardika tentang “Ideologi Militer dan Prospek Militerisme”¹⁹, yang menempatkan ideologi militer dan prospeknya ke depan dalam ranah perpolitikan di Indonesia. Di sini dia membahas tentang militerisme secara global, partai politik dengan ideologi militerisme. Salim Said dalam Makalah Seminar Nasional Peringatan 40 Tahun Akademi Militer Magelang 8 November 1997, tentang “Kepemimpinan Politik TNI dalam Perspektif Sejarah.”²⁰

Literatur lain dalam bentuk skripsi yang disusun oleh M. Hisyam, “Reposisi Profesionalisme Militer di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”.²¹ Ia mengungkapkan keprofesionalan militer Indonesia sebagai alat negara atau sebagai alat kekuasaan semata. Di sini penulis menekankan pada lembaga dan peran militer sendiri. Serta skripsi yang ditulis oleh saudara Syukran Ma'mun Hidayat, *Islam dan Militer : Dinamika Hubungan Gerakan Islam Politik dan Militer di Indonesia pada Masa Orde Baru (1996-1998)*²², yang membahas

¹⁷ Erick A. Nordliyer, *Militer dan Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994).

¹⁸ Rudini, at.AL., *ABRI dan Kekerasan*, Yogyakarta : Insidiedie, 1999).

¹⁹ *Militerisme*, <http://www.balipost.co.id/2005/27>, akses 4 April 2007

²⁰ Salim Said, Makalah Seminar Nasional Peringatan 40 Tahun Akademi Militer Magelang 8 November 1997.

²¹ M. Hisyam, “Reposisi dan Profesionalisme Militer di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”, skripsi, Fak. Syari'ah/JS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²² Syukran Ma'mun Hidayat, “Islam dan Militer , Dinamika Hubungan Gerakan Islam Politik dan Militer di Indonesia pada Masa Orde Baru (1996-1998)”, skripsi Fak.Adab/SPI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

titik temu hubungan secara sehat (*objective civilian control*) antara Islam politik dan militer di Indonesia khususnya pada masa orde baru.

Semua karya-karya ilmiah di atas belum ada yang membahas tentang konsep kepemimpinan negara militerisme sendiri, apalagi dianalogikan dalam konteks tata pemerintahan Islam khususnya.

E. Kerangka Teoritik

Merujuk suatu konsep kepemimpinan terutama kepemimpinan negara telah menjadi studi para ahli-politik, ilmuwan baik muslim maupun non muslim. Bagaimana seorang pemimpin sendiri (kepala negara) terlegitimasi pada suatu komunitas dalam wilayah tertentu. Semua itu tidak terlepas dari suksesi-kualifikasi maupun otoritas seorang pemimpin (kepala negara). Kepemimpinan dalam Islam terkenal dalam istilah *khalifah Islamiah* atau bisa disebut juga dengan *imamah*. Seorang kepala negara dalam Islam disebut khalifah/imam. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Ashulthaniyah* menulis teori tentang pemilihan atau pengangkatan seorang khalifah (kepala negara) melalui jalur : 1) Ahl Ikhtiar, 2) jalur Ahl Al-Al'aqdi wa al Halli, 3) Ahl al Imamah.²³ Di antara syarat imamahnya : mempunyai sikap adil dengan segala persyaratannya, ilmu pengetahuan yang memadai, sehat jasmani, rohani dan lisannya, keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat, wawasan dan keahlian ketatanegaraan, dan dari golongan Quraisy. Betapa idealnya syarat yang diberikan Al-Mawardi, tidak lain untuk tujuan pembatasan syarat seorang

²³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Mesir : Al-Halabi, 1973), hlm. 78.

pemimpin negara. Semakin sulit syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin semakin selektif juga dalam memilih seseorang untuk menduduki kursi kepemimpinan, agar tujuan negara lebih tercapai dan kesejahteraan masyarakat terealisasi, kecuali figur/orang-orang yang akan mendudukinya benar-benar mampu dan *capable* mengemban tugas-tugasnya seorang kepala negara. Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin atau kepala Negara harus menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat khususnya dan kehidupan manusia umumnya, menghentikan kezaliman dan menghancurkan kesewenang-wenangan, mewujudkan sebuah sistem politik, memberlakukan hukum Islam secara mantap serta menciptakan ketentraman dalam masyarakatnya.

Demikian juga seorang pemimpin (kepala negara) ditaati oleh rakyatnya atas segala tugas dan kewajiban-kewajiban seorang kepala negara. Dalam teori ini dikenal dengan teori kontrak sosial, adalah suatu kontrak persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.²⁴ Hal ini diungkapkan oleh Mawardi sendiri, Thomas Hobis, John Locke dan J.J. Rouseu. Menurut Alwardi kontrak sosial melibatkan kedua belah pihak rakyat disatu sisi dan kepala negara di sisi yang lain.²⁵ Sedangkan menurut Hobbes, bahwa kontrak sosial terjalin sesama rakyat sendiri, kepala negara atau raja tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Raja dengan kekuasaan mutlak merupakan pelimpahan dari

²⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 94.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 67.

kekuasaan orang seorang anggota masyarakat yang ikut membuat kontrak sosial, sehingga menurut Hobbes rakyatlah yang pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan oleh raja. Dengan begitu mereka tidak boleh mengeluh terhadap kebijaksanaan dan tindakan raja. Tetapi kontrak sosial menurut Locke, pihak yang melaksanakan kontrak sosial itu adalah rakyat dan raja sendiri. Teori ini sama dengan teori Alkawardi, pemerintah merupakan suatu *trust* (amanah) sedang rakyat sebagai *trustor* (pemberi amanat) dan raja sebagai *trustee* (penerima amanat) dan amanat itu dapat ditarik atau dicabut kembali oleh *trustor* kalau ternyata *trustee* mengabaikan kewajibannya.²⁶ Sedang J.J. Rousseau sepakat dengan ketiga teori di atas, tetapi gagasan Rousseau yang membedakan kontrak sosial itu hanya sesama rakyat dan anggota masyarakat, melalui kontrak tersebut masing-masing melimpahkan segala hak perorangan kepada komunitas sebagai satu keutuhan.²⁷

Teori lain tentang kepemimpinan negara (kepala negara) menurut Ibnu Taymiyah haruslah seorang kepala negara adalah orang-orang yang secara obyektif betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dan janganlah seorang kepala negara terpengaruh oleh

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁷ Sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian atau kontrak sosial, menurut Rousseau adalah terciptanya kemauan umum (*volunte generale*) yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian tersebut dan terbentuknya masyarakat (*gemeinschaft*) kemauan akan membentuk kesatuan umum yang akhirnya membentuk kekuasaan. Soehino, *Op.cit*, hlm. 128.

faktor-faktor subyektif seperti hubungan keluarga ataupun golongannya.²⁸ Yang cukup menarik dari Ibnu Taymiyah adalah mengenai hakikat kepemimpinan itu sendiri. Sebenarnya posisi seorang pemimpin merupakan sebuah dukungan dari sekelompok orang untuk seseorang.²⁹ Dalam hal ini yang menjadi kekuatan utama adalah sebuah otoritas. Jadi kekuatan seorang raja adalah otoritasnya.³⁰ Menurutny, seorang Imam atau pemimpin Negara harus dapat menciptakan kesejahteraan material maupun spiritual masyarakatnya. Apabila seorang pemimpin (kepala Negara) menyatakan perang melawan musuh, maka jihad merupakan kewajiban masyarakat (fardh 'alal-kifayah), tetapi apabila pihak musuh yang mulai menyerang maka jihad berubah menjadi kewajiban bagi setiap muslim (fardhul 'ain).

Sedangkan untuk gaya dan tipe kepemimpinan secara umum, dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu :

1. Otokrasi

Pemimpin memperlakukan organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi, sehingga semua unsur yang ada dalam lingkup kepemimpinannya semuanya mengarah pada kemauan si pemimpin. Hal ini memungkinkan lahirnya pandangan pada diri pemimpin tipe ini akan mengagungkan kekuasaan formalnya.

²⁸ Qomarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Bandung : Pustaka ITB, 1983), hlm. 121.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 229.

³⁰ Kekuatan dan otoritas hanya bisa direalisasikan apabila dimantapkan. Sedangkan tujuan dari sebuah jabatan adalah untuk merealisasikan fungsi-fungsi tertentu yang tidak mungkin direalisasikan tanpa adanya otoritas. Apabila otoritas yang memungkinkan realisasi fungsi-fungsi tersebut dapat ditegakkan, negarapun dapat ditegakkan.

2. Militeristik

Militeristik tidak mesti ada pada organisasi militer. Dalam organisasi sipilpun bisa terjadi jenis kepemimpinan seperti ini. Dalam gaya kepemimpinan seperti ini seorang pemimpin harus ditaati dan dipatuhi secara mutlak.³¹

3. Paternalistik

Pemimpin cenderung menganggap anggota yang dipimpinnya tidak pernah dewasa, karenanya jarang diberikan kesempatan bagi yang dipimpinnya untuk mengembangkan daya kreasi, inisiatif dan mengambil keputusan dalam bidang tugas yang dibebankan padanya. Figur pemimpin biasanya lebih menonjol dan dominan.

4. Kharismatik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikemukakan bahwa “kharismatik” berarti bersifat kharisma, sedang perkataan kharisma diartikan sebagai “keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya” atau “atribut kepemimpinan didasarkan atas kualitas kepribadian individu”.

Tipe kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain, sehingga

³¹ Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, MA, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki pemimpin.³²

5. Demokratis

Model kepemimpinan ini berusaha menyingkronkan antara kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan orang yang ada di dalamnya. Dalam model ini, seorang pemimpin biasanya lebih mengutamakan kerja sama. Ia lebih terbuka (*inklusif*), mau dikritik dan menerima saran dan pendapat orang lain dalam mengambil keputusan dan kebijakan selalu mengutamakan musyawarah. Tidak ada kekhawatiran bagi model pemimpin ini disaingi oleh yang dipimpinnya, bahkan berusaha membinanya agar bersama-sama lebih maju.³³

Dikarenakan kajian ini meneliti tentang praktek-praktek kepemimpinan negara yang tentunya sedang terjadi ataupun yang sudah lama terjadi dalam konteks Islam khususnya yang kemudian dianalisis dalam pandangan fiqh siyasah. Sudah barang tentu hal itu merupakan sebuah sejarah praktek kepemimpinan negara dalam suatu tata pemerintahan. Maka penulis menggunakan pendekatan kesejarahan dalam mengungkap dan mendiskripsikan masalah tersebut. Karena pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa, lebih dari itu peristiwa-peristiwa tersebut dianalisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat

³² Hadar Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 174-175.

³³ Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, MA, *Jeram-jeram*, hlm. 102.

memberi penjelasan mengenai aspek-aspek : a) bagaimana diskripsi peristiwanya, b) mengapa peristiwa itu terjadi, dan c) kemana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.³⁴ Dalam perkembangan penulisan sejarah muncul sejarah diskriptif analisis, menurut Sartono Kartodirjo, penulisan sejarah yang diskriptif analitis ini berusaha menguraikan kausalitas, faktor-faktor kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa. Sedangkan dalam sejarah analitis digunakan metode kritis dan konsep-konsep serta teori-teori ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai alat interpretasi terhadap fenomena sejarah, termasuk ilmu-ilmu sosial³⁵ yang termasuk di dalamnya sosiologi, struktur sosial, kontruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan artian menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (primer).³⁶

Dengan demikian, materi pembahasan didasarkan pada buku-buku,

³⁴ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

³⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, (Bandung : Mandar Maju, 1996) hlm. 33.

³⁶ Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

ensiklopedi, majalah, kumpulan makalah dan artikel, surat kabar³⁷, Yang membahas tentang politik khususnya tentang model kepemimpinan negara militerisme dalam konteks pembentukan tata pemerintahan Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif–analitis, artinya dengan mendiskripsikan tentang konsep kepemimpinan negara militerisme secara komperhensif untuk kemudian dianalisa secara logis³⁸, sehingga mendapat suatu kesimpulan tentang relevansi praktek kepemimpinan militerisme dalam sebuah negara perspektif fiqh siyasah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, yaitu pendekatan untuk mengetahui latar belakang seorang tokoh, sebab akibat, signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan serta perkembanganya³⁹. Karena tindakan kepemimpinan seorang kepala negara tidak terlepas dari sejarah dan pengaruh dari lingkungan yang ada pada masanya.

Di samping itu juga dipergunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk menemukan rasionalitas konsep dari berbagai data yang didasarkan pada konsep fiqh siyasah. Dengan demikian dari dua pendekatan yang penyusun pergunakan sangat mendukung untuk menemukan sebuah kebenaran yang valid.

³⁷ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi, hlm. 54.

³⁸ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

³⁹ Prof. Dr.Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : Pt. Remaja Posdakarya, 2003), hlm. 65

4. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian⁴⁰ yang berkaitan dengan konsep-konsep militerisme dan praktek-praktek kepemimpinan negara militerisme dalam negara Islam. Adapun literatur yang dikaji adalah Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, New York : Palgrave, 2002, terjemahan. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000 (ed), Tarikh al-Daulat al-Islamiyah, Tarikh al Khulafa, Suyathi Jalal al-Din dan sumber-sumber lain tentang Islam dan militerisme yang relevan serta pelacakan situs-situs internet yang menulis dan mengeksplorasi tentang kepemimpinan negara militerisme.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka penyusun mempergunakan analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisa data umum yang ada dalam beberapa literatur, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan khusus. Artinya, penyusun mengkaji tentang praktek-praktek kepemimpinan negara Islam dalam tata pemerintahan dan kenegaraan Islam. Selanjutnya dilihat dari ciri khusus dari konsep militerisme yang terdapat pada praktek kepemimpinan negara Islam sendiri, dalam konteks fiqh siyasah. Selanjutnya bisa diperoleh konsekuensi dan relevansinya.

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (ed.) cet. 4, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain : *bab pertama* Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian dilanjutkan dalam *bab kedua* akan mengeksplorasi pengertian militerisme, kriteria dan unsur, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya militerisme secara umum yang dilanjutkan dengan pengertian, kriteria dan unsur, faktor-faktor kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara dalam tinjauan umum pula. Direfleksikan kepada pembahasan selanjutnya dalam *bab ketiga*, bagaimana konsep dan prinsip kepemimpinan dalam Islam, yang dikontekskan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasidun, kriteria dan unsur-unsur kepemimpinan militerisme dalam Negara Islam, serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kepemimpinan militerisme dalam Negara Islam.

Dari bab-bab di atas beserta pembahasannya sekiranya dapat dianalisis dalam *bab keempat*, tentang model dan konsep kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara dalam perspektif fiqh siyasah, dampak kepemimpinan militerisme dan relevansinya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam *bab kelima* akan menutup penulisan ini dengan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian penjelasan tentang praktek kepemimpinan militerisme dalam sebuah negara yang di lihat dari fiqh siyasah, penyusun mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kepemimpinan militerisme dalam sebuah negara adalah kepemimpinan yang mempunyai kaitan dan kecenderungan kepada praktek praktek kepemimpinan ke dalam kepemimpinan Negara yang menerapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, idiologi, wacana dan perilaku militer seperti : komando, hirarkhi, disiplin pemaksaan, keseragaman, dan lain lain, atau kepemimpinan Negara yang menggunakan kekuatan militer untuk kepentingan pemimpin Negara, atau kepemimpinan Negara dibawah wewenang dan kepentingan dominasi militer (institusi militer), dan atau kepemimpinan Negara yang menggunakan prinsip-prinsip kekerasan dalam proses ketatanegaraan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, represif atau alienatif. Kekerasan yang terkandung dari konsep militerisme adalah kekerasan dari akibat dan dampak perang. Karena perang secara langsung atau tidak langsung tidak dapat menghindari nilai-nilai kekejaman, pemaksaan, pembunuhan/korban, senjata dan kehancuran sebuah tatanan konstruksional. Adapun kekerasan yang di timbulkan akibat dominasi militer adalah prinsip, idiologi dan nilai-nilai yang di

usung militerisme cenderung tegas, keras, kaku, hirarkhis dan system komando (perintah) bukan tanggung jawab atau kompromi. Sehingga militer sering berbelok dari profesionalismenya sebagai alat Negara, menyelamatkan Negara (messiah). Hal itu sering di jadikan alasan untuk mendominasi masyarakat, dan terlibat dalam urusan-urusan politik (Negara) demi kepentingan kelompok, golongan atau lembaganya. Bahkan di gunakan sebagai alat penguasa semata.

2. Sementara kepemimpinan militerisme yang terjadi dalam tata pemerintahan Islam masa nabi muhammad SAW. Dan al-khulafaurrasidun (khalifah Abu bakar dan khalifah Umar bin Khattab) adalah kepemimpinan militerisme yang mempunyai kecenderungan terhadap praktek-praktek militerisme sebatas penerapan prinsip-prinsip, nilai-nilai ,wacana dan perilaku militer yang didukung oleh keadaan Negara yang masih belum kondusif, masa membangun kekuatan dan mencari legitimasi dalam ancaman keamanan Negara yang menuntut kepemimpinan Negara mengangkat senjata, memecahkan pertempuran, melawan, membela diri, perang melawan musuh. Sehingga secara tidak langsung unsur-unsur kekerasanpun tidak dapat dihindari. Adapun akibat dan dampak selanjutnya masuk kedalam dominasi militer yang mempunyai peran, posisi dan kedudukan penting dalam pemerintahan, tidak sekedar sebagai alat negara tapi terlibat pada internalisasi, intervensi elit militer kepada urusan-urusan negara (politik) yang pada dasarnya bukan ranah prifesimalisme militer. Hal ini terjadi khususnya pada masa pemerintahan

khalifah Abu bakar (dominasi militer) dan khalifah Umar bin khattab (internalisasi dan intervensi militer kedalam urusan-urusan negara dan politik).

3. Sedangkan fiqh siyasah memandang kepemimpinan militerisme dalam sebuah negara pada umumnya bersebrangan dengan prinsip-prinsip militerisme pada zaman pemerintahan Islam, karena Islam tetap mengagungkan demokrasi dan kompromi sinergis antara masyarakat dan kepala negara (pemimpin negara), Sedangkan kepemimpinan negara militerisme umumnya cenderung kepada tiranis. Penguasaan penuh, kekuasaan di bawah keputusan dan perintah satu figur pemimpin negara (kepala negara). Kepemimpinan militerisme yang ada mempunyai hubungan erat dengan kepemimpinan dictator, praktek-praktek kekerasan dan lahirnya Negara militeristik. Di samping sebagai kepemimpinan dan pengorganisasian yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan keseragaman berarti mengabaikan perbedaan dan kepentingan, sembari menekankan solidaritas kelompok dalam bentuk-bentuk kewajiban bersama.
4. Dapat diambil kesimpulan akhir, relevansi kepemimpinan militerisme dalam sebuah negara secara umum atau kepemimpinan militerisme dalam negara Islam, secara ideal dirasa masih bersebrangan dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, perilaku kepemimpinan dalam negara Indonesia dengan sistem demokrasi pancasila. kemungkinan penerapannya bila Indonesia mengalami alasan dan faktor yang sama dengan masa rasul, Abu bakar dan

Umar. Tapi secara umum perang dan kekerasan merupakan tindakan dan keputusan yang benar-benar harus dihindari dengan apapun alasannya. Meskipun dalam keadaan mendesak atau terpaksa, tidak ada alasan kekerasan dan perang menjadi tindakan alternatif dalam perkembangan politik modern sekarang ini.

B. Saran-Saran

1. Penting untuk menciptakan negara yang baik, aman dan sinergis untuk kepentingan agama, bangsa dan negara kiranya diwujudkan dengan kepemimpinan negara yang efektif dan efisien. Dimana pemimpin negara mampu bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan keadaan dan situasi negara atau masyarakatnya secara tepat dan menyeluruh, baik dalam prinsip-prinsip, nilai-nilai, apapun konsep kepemimpinannya.
2. Salah satu faktor yang paling rentan terjadinya kepemimpinan militerisme dalam sebuah negara adalah militerisasi. Baik pemimpin yang menggunakan militer sebagai penyokong kekuasaannya atau diminasi militer ke dalam ranah sosial - politik negara. Untuk itu diperlukan control secara simultan kepada tugas dan wewenang kepala negara demokrasi elit rakyat (warga negara) melalui wakilnya. Sedangkan bagi militer diperlukan control obyektif (objective civilian control), yang memberi kekuasaan dan wewenang terhadap militer sesuai dengan ranah profesinya sebagai alat negara (alat pertahanan – keamanan) yang tangguh dan

elegan, bukan sebagai alat kekuasaan demi sebuah kepentingan seorang penguasa.

3. Sejarah dan pengalaman masa lalu dengan tepat, efektif atau tidaknya kepemimpinan militerisme dalam sebuah Negara dan perjuangan politik Islam atau politik Indonesia, mesti harus menjadi pijakan sebagai pelajaran berharga untuk menempuh sistem dan strategi baru kepemimpinan negara negara demokrasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1998

B. Hadis

Ibnu Hambal, Imām Ahmad, *Musnad al- Imam Ibn Hanbal*, Bairut : maktabah al- Islām Daar al- Sawarfi –al- Tabangah wa nārr, t.t.

C. Fiqh

Bana, Jamal al, *al-Jihād Daar al-Fikr al-Islām*, alih bahasa Kamran A. Irsyadi, yogyakarta: Pilar Media, 2005

Khaduri, Majid, *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : Terawang Press, 2002

Khallaf, Abdul Wahab, *as- Siyāsah as- Syar’iyah*, Dar al- Fikr al- Arābī,t.t

----, *Politik Hukum Islam*, terjemahan Zainudin Adnan, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005

Khuldun, Ibnu, *Muqoddimah*, Bairut : Daar al- fikr t.t

Mawardi, al, *al- Ahkam as- Shulthaniyah*, Kairo : Mustafa al- Bābī al- Halābī Wa al- Laudahu, 1973

----, *Hukum Tatanegara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terjemahan Abdul Hayyied al-Khattani dkk,ed.1, Jakarta : Gema Insani Press, 2000

Maudūdi, al, Abul A’la, *Khilafah Wa al-Mulk*, terjemahan Mohammad al-Baqir, Bandung : Mizan, 1978

----, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, terjemahan Asep Hikmat, Bandung : Mizan, 1993

----, *The Islamic law and Constitution*, (ed.0, Lohore : Islamic Publication, 1997

Zahrah, Abu, *al-‘Alaqtu al- Dauliyah Fi al- Islām*, Bairut : Daar al- Kutūb al- Islāmiyah, 1988

D. Lain- Lain

Abdullah, Taufik dan Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta :1989

Abdurrahman, Dudung , (et. al.), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik- Modern*, Yogyakarta : Lesfi, 2003

Abidin Ahmad, Zainal, *Konsep Negara Bermoral Menurut al- Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Al-Bana, Jamal, *Revolusi Sosial Islam; Dekinstroksi Jihad dalam Islam*, terjemahan Kamran A.Irsyadi, Yogyakarta : Pilar Media, 2005

Ali, Ameer, *Api Islam; Sejarah,Evolusi dan Cita- cita Islam*, alih bahasa HB. Yasin , Jakarta : Bulan Bintang, t.t.

Aly, Run, *Mengulang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter*, Jakarta: Kompas, 2004

Aqqad, Abbas Mahmud, *Keagungan Umar bin Khattab*, terjemahan Abdul Qadir Mahdamy, Solo : Pustaka Mantiq, 1993

Ari Dwi Payana , AAGN,(et. al.),*Masyarakat Pasca Militer;Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia*,Yogyakarta :Institute for Resert an Empowerment (IRE), 2000

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (ed.) cet.4, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Badudu,, Js., *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1983

Cipto, Bambang, *Partai Kekeuasaan dan Militerisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000

Desch, Michael, *Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Diamond, Larry dan Mare F. Platner, *Hubungan Sipil – Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001

E. Tambaruka, Rustam, *Pengantar Ilmu Sejarah; Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta : Rineka Cipta, 1989

- Fatullah Gulen, M, *Versi Terdalam Kehidupan Rasul Muhammad*, terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Faturrahman, Deden dan Wawan Sobari, *Teori Politik Baru*, Malang : UMM. Press, 2004
- Fortuna, Dewi, *Gusdur Versus Militer; Studi Tentang Hubungan Sipil- Militer di Era Transisi*, Jakarta : Wedia Sarana Indonesia, 2002
- Husein Pontoh, Coen, *Menentang Mitos Tentara Rakyat*, Yogyakarta : Resist Book, 2005
- I Nyoman mardika,” Idiologi Militer dan Prospek Militerisme”, <http://www.balipost.co.id/2005/27>, Akses 4 Maret 2007.
- Imawan, Riswanda, *Membelah Politik Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Indrayana, “Militansi”, *Kompas*, No. 154, Th. Ke-42 (Sabtu, 2 Desember 2006).
- K. Hitti, Philip, *History of The Arabs*, terjemahan R. Cecep Lukman Yasin dkk, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Pustaka, 2002
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.7, Bandung : Mundur Maju, 1996
- Khan, Qomarudin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung : Pustaka ITB, 1983
- Kirbiantoro, “Militerisme”, <http://www.tempo.co.id/2006/01>, Akses 15 September 2007.
- Kirbiantoro,s dan Dody Rudianto, *Pergulatan Partai Politik Indonesia; Nasionalisme- Islamisme, Komunisme- Militerisme*, Jakarta : Intermedia Publishe, 2006
- Liebnecht, KARL, *Militerisme dan Anti Militerisme*, Yogyakarta : IRE, 2006
- M. Lapidus, Ira, *History of Islamic Societies*, alih bahasa Gufran A. Mas`adi Sejarah Sosial Umat Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Machasin, “Praktik Politik Umat Islam Pada Masa Klasik”, *Jurnal Bahasa Peradaban dan Informasi Islam*, “*Thaqafiyat*” Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 1, Vo. I, 2000.
- Madjid, Nurkolis, *Indonesia Kita*, Jakarta : Universitas Paramadina, 2004

- Mahmudunnasir, Syeed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung : Remaja Posdakarya, 1994
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Mudzar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998
- Muhammad Haikal, Husein, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar ash- Shiddiq*, terjemahan Abdul Qadir Mahdamy, Soli : Pustaka Maantiq, 1994
- Muthahari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, terjemahan Satrio Panandito, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991
- Nawawi, Hadar, *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993
- , *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet.v, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- , *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Parlmutter, Amor dan P. Hatington, *Militer dan Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004
- Pratomo Yulianto, Dwi, *Militer dan Kekuasaan; Puncak-puncak Krisis Hubungan Sipil- Militer di Indonesia*, Yogyakarta : Narasi, 2005
- Rahman, Afzalur, *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, Jakarta : Amzah, 2002
- Rudini, et.al., *ABRI dan Kekerasan*, Yogyakarta : Insidiedie, 1999
- Said, Salim, *Militer Indonesia; Dulu, Kini dan Kelak*, Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Salim Peter dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet.2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Salim Said, “Praktek Politik militer”, <http://www.mil.com.id/2007/02>, Akses 9 September 2007

- Salmi, Jamil, *Violence and Democratic Society: Helogisme dan Masyarakat Demokrasi*, Yogyakarta : Pila Media, 2005
- Shaban, MA, *Sejarah Islam*, Semarang : Walisanga Press, 1993
- Shaw, Martin, *Bebas Dari Militer; Analisis Sosiologis atas Kecenderungan Masyarakat Modern*, terjemahan Imam Baehaqie, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Shidiqi, Nourouzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI. Press, 1993
- Suehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2003.
- Syalabi, A, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 1., terjemahan Muhtar Yahya, Jakarta : Pustaka al- Husna, 1993
- Tikok, Sembodo, *Hukum Tata Negara*, Bandung : Eresco, 1988
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta : LKIS, 1998
- Watt, Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, terjemahan Helmy Ali dkk Jakarta : P3M, 1998
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamayah 2*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Yulianto, Arif, *Hubungan Sipil dan Militer dalam Pusaran Demokrasi*, Yogyakarta : Insist Press, 2000
- Yusuf Musa, M, *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya : al- Ihklas, 1990
- Zahrah, Abu, *Hubungan- hubungan Internasional dalam Islam*, terjemahan Zein Hasan, Jakarta : Bulan Bintang, 1973
- Zainudin, Muhadi, dkk, *Studi Kepemimpinan Islam; Telaah Normatif dan Historis*, Yogyakarta : al- Mihsin Press, 2002
- Zuhri, Muhammad, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Mohammad Rasulullah*, Yogyakarta : Lesfi, 2004

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm.	F.N.	BAB	Terjemahan
1	39	1	III	Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi
2	40	5	III	Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah
3	40	6	III	Dan ingatlah ketika kamu sekalian di ciptakan sebagai khalifah (penguasa) dari sebagian kaumnya nuh
4	40	7	III	Pemimpin adalah banyangan Allah di muka bumi, barang siapa yang memuliakan pemimpin maka akan di berkati dan di tinggikan derajadnya di dunia dan di muliakan pada hari kiamat, dan barang siapa menghina pemimpin maka akan di hinakan kelak di hari kiamat.
5	43	13	III	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu yang mengerjakan amal-amal yang salah bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mmereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebellum mereka berkuasa , dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah di ridlai-NYA untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentaosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang sipa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

No	Hlm.	F.N.	BAB	Terjemahan
6	46	18	III	Telah di izinkan (beperang) bagi orang-orang yang di perangi, karena sesungguhnya mereka telah teraniaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang- orang yang telah di usir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karma mereka berkata:” Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah di robohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak di sebut nama Allah. Sesungguhnya pasti Allah menolong orang yang menolong (agama) NYA. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha kuasa.
7	55	37	III	Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabatrasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan,. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
8	64	3	IV	Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri
9	64	4	IV	Dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah.
10	64	5	IV	Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.
11	65	6	IV	Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.
12	66	9	IV	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
13	66	10	IV	Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Munawir Sjadzali

Lahir di Klaten, 7 November 1925. setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama/Tinggi Islam "Mambaul Ulurn" di Solo, selanjutnya menjadi guru Ungaran, Semarang, dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbang tenaga, antara lain sebagai penghubung antara Markas Pertempuran, Jawa Tengah dengan Baadan-badan kelaskaran Islam. Kariernya dilingkungan Departemen Luar Negeri dimulai sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada Seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri beliau menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai Minister/ Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974), dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980). Adapun tugas-tugas di dalam negeri yang pernah dijabatnya adalah sebagai Kepala Bagian Amerika Utara (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak 1980. Pendidikan Universiternya di luar negeri pada University of Exeter, Inggris (1953-1954); dan Georgetown University, Washington DC, serta memperoleh gelar MA. Dengan tesis *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concepts* (1959). Makalah dan pidato penting yang pernah disampaikan pada forum Internasional antara lain: "shari'ah: A Dynamic Legal System" yang diucapkan di depan Seminar on Syari'ah and Codification di Kolombo tahun 1985. terakhir ia juga menjabat sebagai staf pengajar pada Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta.

Muhammad 'Abed al-Jabiri

Lahir di Figuig (Uxda) pada tahun 1936 M. Tahun 1955 M ia mendapat ijazah Tsanawiyah sekaligus Diploma satu dalam bidang teremah. Tahun 1957 M. ia memperoleh gelar Sarjana Muda sebagai mahasiswa lepas. Akhirnya ia masuk Fakultas Adab di Rabat tahun 1958 M. dengan mengambil Filsafat sebagai bidang spesialisasinya dan selesai tahun 1967 M. sejak itu ia mengajar di Fakultas Adab Universitas "al-Khams" Rabat dalam masa kuliah filsafat dan pemikiran Arab Islam. Gelar doktor diraihinya pada tahun 1970 M. di Universitas yang sama dalam bidang filsafat. Pada tahun 1988 M. ia mendapatkan penghargaan "Bagdad Prize" untuk budaya Arab dari UNESCO. Ia adalah penulis terkemuka saat ini yang mengangkat berbagai gagasan segar dalam rangka proyek kebangkitan Islam, salah satu masalah, yang ia garap adalah hubungan agama dan negara, yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Ad-Din wa ad-Dazdah wa Tathhiq asy-Syari'ah*, yang diterbitkan oleh Markaz Dirasat al-Wahdah al-"Arabiyyah, Beirut,

1996. selain dari itu karya-karyanya cukup banyak diantaranya adalah *at-Turas wa al Hadasah*, *Naqd al-Aql al-Arab*, *Nahnu wa at-Turas*, dan *ad-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan*.

Imam Al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin al-Basri al-Bagdadi al-mawardi 974-1058 M. Ia adalah seorang Imam besar, ahli fiqh, usul fiqh, dan tafsir yang hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriyah dan paroh pertama abad kelima hijriyah. Ia belajar Hadis di Bagdad pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi), Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Mangiri, dan Abu al-Qusyairi. Sedang guru-gurunya dalam bidang fiqh adalah Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah, dan Ali Abu al-Asfarayini, Imam Madhab Safi'i di Bagdad.

Al-Mawardi wafat ada bulan Rabi'ul Awal tahun 1058 M. dalam usia 86 tahun. Sebagai ilmunan, ia meninggalkan banyak sekali buku, diantaranya: di bidang fiqh, *al-Hawi al-Kabir dan al-Iqna'*, di bidang fiqh siyasah, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Walayah ad-Diniyyah*, *Qawanin al-Wuzarah*, *Siyasah al-Malik*, *Tasilun an-Nazari wa Ta'jil az-Zafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasah al-Maliki*, *Siyasatu al-Maliki dan Nasihat al-Mulk*, di bidang tafsir *al-Hikmah*, di bidang sastra, *Adad ad-Dunya wa ad-Din* dan di bidang aqidah ia menulis kitab *A'lamu an-Nubuwwah*.

Al-Gazali

Nama aslinya Muhammad bin Muhammad at-Tusi, dengan nama kecil abu Hamid, dan mempunyai gelar Hujjatul Islam. Ia adalah ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam. Ia dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 1058 M. namanya begitu populer, baik dikalangan akademis (cendekiawan) maupun kalangan masyarakat umum.

Al-Gazali sebagai seorang pemikir besar Islam, memiliki kemahiran dalam berbicara dan sangat produktif dalam menulis. Karya tulisnya mencapai ratusan buah, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, di antara karya-karyanya adalah dalam bidang fiqh dan usul fiqh ; *Ihya' 'ulum ad-din*, *al-Basid*, *al-Wasid*, *al-Wajiz*, *al-Khulasah*, *al-Mustasfa*, *al-Manhul*, dalam bidang filsafat, kalam dan logika; *Magasid al-Falasifah*, *Tahafut al-Falasifah*, *al-Munqiz min ad-Dalal*, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, *Faisal at-Ta'rifah*, *Qawa'id fi al-'Aqa'id*, *al-Maqsud al-Asma' fi Syarhi Asma' Ilahial-Husna*, *Mi'yar al-Ulum*, *Mahikku an-Nazar*, *al-Qayatas al-Mustaqim*, *Iljam al-Awam fi al-'ilm al-Klaam*, *Jawahir al-Kalam*, *Kimia as-Sa'adah*, *Ma'arij al-Quds*. Dalam bidang tasawuf, akhlak dan pendidikan: *Minhajul Abidin*, *Bidayah al-Hidayah*, *Mizan al-Amal*, *Mi'aj as-Salikin*, *Ayyuhul Walad*. Dalam bidang perbandingan agama; *al-Qaul al-jamil fi ar-Raddi 'ala man Gayyara al-Injil*, *Fada'ih al-Batiniyyah*, *Hujjah al-Haq*, *Mufasssal al-Hilaf*, *ar-*

Raddu al-Jamil li alahiyyah Isa bi Sarahi al-Injil. Serta masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

Ibnu Taimiyah

Nama aslinya Taqiy al-din Abu al-abbas ibn abd al Halim ibn abd salam ibn taimiyah. Lahir di Haran, dekat Damaskus, Syiria. Pada tanggal 10 rabiul awwal 666 H/ 22 januari 1263 M. meninggal dunia di Damaskus 20 zulkaidah 728 H/ 26 september 1328 M. dia dibesarkan di keluarga yang taat beragama dan berpendidikan, belajar dari para guru dan ulama yang terkemuka seperti Ali Abd Al-Qawi, disamping studi al-quran, hadis dan bahasa Arab ia mendalami matematika, sejarah, kebudayaan dan kesusastraan Arab, hukum, mantiq, dan filsafat. Hukum Islam yang dipelajarinya secara khusus ialah mazhab hambali, ia hidup di zaman kemunduran Islam (1258). Ide dan pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran *salaf al-shalihin* karena itu gerakannya disebut dengan gerakan salaf kembali ke al-Qur'an dan hadis, ia bertujuan membersihkan aqidah Islam dari kepercayaan yang bid'ah, khurafat dan tahayul. Pemikiran dan usaha reformasinya terutama dalam bidang aqidah, hukum, politik dan filsafat.

Karya tulisnya yang terkenal dalam bidang aqidah/teologi antara lain; *al-aqidat al wasithiyah al imam*. Dan dalam bidang hukum Islam, antara lain, *majmu' fatawa ibnu taimiyah*, *al-Qiyash fi sarh al Islam*. Dalam bidang politik karyanya antara lain; *al-siyasah al syar'iyah al amr hi al ma'ruf wa al- nahy 'an al munkar*. Serta dalam bidang filsafat karyanya adalah *Naqd al manthiq*.

Dr. Salim Said

Bekerja sebagai wartawan selama sepermpat abad sebelum pada akhirnya memutuskan mengalihkan kegiatannya ke dunia akademik. Putra kelahiran Pare pare (sulawesi selatan) ini memulai karier jurnalistiknya pada harian Angkatan Bersenjata pada tahun 1965, dan bekerja di sanahingga tahun 1970, ketika bersama teman-temannya bekerja sama mendirikan majalah Tempo. Pengalaman bekerja pada Koran resmi militer itu memberi kesempatan kepada Saim Said untuk mengamati dari dalam tingkah laku dan titik pandang politik tentera Indonesia. Pengalaman itulah yang kemudian hari menjadi modal utama, sekaligus pendorong bagi Slai Said untuk menekuni penelitian mengenai peran politik Anktan Bersenjata Indonesia. Sebelum mendapatkan gelar doktor dalam ilmu politik di Ohio State Uneversity (1985), terlebih dahulu Salim Said mendapatkan gelar Doktorandus dalam ilmu sosiologi dari Universitas Indonesia dengan tesis mengenai *Sejarah Social Film Indonesia*. Selama bertahun-tahun sebagai wartawan majalah Tempo selain menulis berita-berita politik dalam dan luar negeri Salim Said juga aktif menulis kritik film yang kini telah di kumpulkan dan di terbitkan dalam tiga buku. Selama delapan tahun (1980-1988), Salim Said adalah salah seorang ketua Dewan Kesenian Jakarta. Sebagai kritikus film Salim Said juga aktif dalam berbagai festifal film di dalam maupun di luar negeri,

sebagai panitia ataupun sebagai dewan juri. Salim Said juga aktif sebagai dosen luar biasa pada Fakultas Pasca Sarjana di Universitas Indonesia dan Universitas Jaya Raya serta memberi kuliah teratur di sekolah Staf dan Komando TNI, dan lembaga Ketahanan Nasional Sebagai tamu besar Salim Said mengajar di University Malaya (1970), Thammasat University (1999) dan pada tahun akademik 2001-2002 mengajar di Ohio University.

Samuel P. Huntington

Adalah professor di Universitas Albert J. Weatherhead III dan pemimpin John M. Olin Institute for Strategic Studies di University Harvard. Ia juga bergabung dengan Universitas Columbia, dan telah bekerja di gedung Putih sebagai *Coordinator of Planning for The National Security Council*. Banyak menerbitkan buku termasuk *The Soldier and The State : The Theory and Politics – Military relation* (1957) dan *Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century* (1991).

Lampiran 3

PETA KEKUATAN POLITIK PADA MASA AWAL ORDE BARU¹

Partai Politik	Pemilu	
	1955 (%)	1971 (%)
PNI	22,3	6,9
Masyumi/Parmusi	21,0	5,4
NU	18,4	18,7
Golkar	-	62,8

PEMILIHAN UMUM ORDE BARU^{**}

	1971	1977	1982	1987	1992	1997
GOLKAR	62,8%	62,1%	64,3%	73,2%	68,1%	80,0%
PPP	27,1%	29,3%	27,2%	16,0%	17,0%	17,0%
PDI	10,1%	8,6%	7,9%	10,9%	14,8%	8,0%
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,1	100,1%	100,1%

PERIMBANGAN KEKUATAN DI DPR RI HASIL PEMILU 1971 – 1992

Tahun	FKP		FPP		FPDI		FABRI		TOTAL	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1971	236	51.30	94	20,44	30	6,52	100	21,47	460	100,00
1977	232	50.43	99	21,52	29	6,31	100	21,47	460	100,00
1982	246	53.47	94	20,44	24	5,21	96	20,88	460	100,00
1987	299	59.80	61	12,20	40	8,00	100	20,00	500	100,00
1992	282	56.40	62	12,40	56	11,00	100	20,00	500	100,00
1997	326	65.9	89	17,8	10	2	74	14,8	500	100,00

¹ Dikutip dari Ikrar Nusa Bhakti (ed.) *Tentara Mendamba Militer: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia* (Bandung: Mizan dan PPW-LIPI, 1999), 106.

^{**} Diolah dari beberapa sumber. Lihat R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 9.

Lampiran 4

STRUKTUR PEMERINTAHAN YANG DISEDERHANAKAN*

Departemen	Keuangan	Penerangan	Agama	Dalam Negeri	Pend. Dasar	Pertanian	Indust. Kecil	Tenaga Kerja	polisi	tentara
Pemerintahan Pusat										
Daerah Otonomi Tingkat I (Provinsi) 20 se-Ind.				Gubernur						Komando Daerah Militer
Karesidenan (6 Provinsi) di Jawa				Residen/ Res. Koord.						Komando dan Resimen
Daerah Otonomi Tingkat I (Kabupaten/Kotapraja) 5/Kab. di Jawa				Bupati/ Wali Kota						
Kawedanan (5/Kab. di Jawa)				Wedana						
Kecamatan (4/Kec. di Jawa)				Camat						
Kelurahan (15-20/Kec. di Jawa)				Lurah						
	Pamong Desa PENDUDUK PADA UMUMNYA									

* Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 42.

Lampiran 5

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Indonesia
AD	: Angkatan Darat
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
AMPERA	: Amanat Penderitaan Rakyat
AMN	: Akademi Militer Nasional
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
Bakin	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
BAKORSTANAS	: Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BKS	: Badan Kerja Sama
BPUPKI	: Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CADEK	: Catur Dharma Eka Karya (Four mission one Fate, Doktrin Perjuangan ABRI
CC-PKI	: Komite Central Partai Komunis Indonesia
CIA	: Central Intelligence Agency (Dinas Inteljen Pusat Amerika Serikat
CSIS	: Center for Strategic and International Studies (Pusat Studi Strategi dan Internasional)
Dandim	: Komandan Distrik Militer
Danramil	: Komandan Rayon Militer
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
G30S/PKI	: Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
Gerwasi	: Gerakan Wanita Sosialis
Gestapu	: Gerakan September Tigapuluh
Gestok	: Gerakan 1 Oktober
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia
Hankam	: Pertahanan Keamanan
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IPI	: Ikatan Pemuda Indonesia
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KAMI	: Komite Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI	: Komite Aksi Mahasiswa Indonesia

KASAB	: Kepala Staf Angkatan Bersenjata Indonesia
KASAD	: Kesatuan Staf Angkatan Darat
KASI	: Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
Kaskopkamtib	: Kepala Staf Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban
Kasospol	: Kepala Staf Sosial Politik
Kaster	: Kepala Staf Teritorial
KNIL	: Koninklij Nederlands Indisch Leger
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kodim	: Komando Distrik Militer
Kopkamtib	: Komando Operasi Keamabnan dan Ketertiban
Koramil	: Komando Rayon Militer
Korpri	: Korp Pegawai Negeri
Kosgoro	: Kesaatuan Organisasi Sera Guna Gotong Royong
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
KOTER	: Komando Teritorial
KSAP	: Kepala Staf Angkatan Perang
KASAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KSAL	: Kepala Staf Angkatan Laut
KASAU	: Kepala Staf Angkatan Udara
Lemhanas	: Lembaga Pertahanan Nasional
Letjen	: Letnan Jendral
MABAD	: Markas Besar Angkatan Darat
Malari	: Malapetaka Limabelas Januari
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
Manipol	: Manifestasi Politik
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Men/Pangad	: Menteri /Panglima Angkatan Darat
Men/Pangau	: Menteri/Panglima Angkatan Udara
Menhankam	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
MI	: Muslimin Indonesia
MIAI	: Majelis Islamil A'laa Indonesia
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Indonesia Sementara
Murba	: Partai Murba
NASAKOM	: Nasionalis-Agama-Komunis
NASASOS	: Nasionalis-Agama -Sosial
Nekolin	: Neokolonialis-Imperealis
NIAS	: Nederlands-Indische Artsen School
NICA	: Nederland Indies Civil Administration
NII	: Negara Islam Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Opsus	: Operasi Khusus
ORBA	: Orde Baru
ORLA	: Orde Lama
P-4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pangab	: Panglima ABRI
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
PELITA	: Pembangunan Lima Tahun
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permesta	: Perjuangan Semesta
Perti	: Pergerakan Tarbiyah Indonesia
PESINDO	: Pemuda Sosialis Indonesia
Peta	: Pembela Tanah Air
P-IPKI	: Partai/ Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
P-Krisna	: Partai-Kristen Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PMI	: Partai Muslimin Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSSI	: Partai Syarikat Islam Indonesia
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
Sekber Golkar	: Sekretariat Bersama Golongan Karya
SKEP	: Surat Keputusan Bersama
Seskoad	: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
SI	: Serikat Islam
SOB	: Staat van Oorlog en Beleg (Undang- Undang Keadaan Bahaya
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	: Sentral Organisasi Kekayaan Sosialis (Swadiri) Indonesia
Supersemar	: Surat Sebelas Maret
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TRI	: Tentara Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
USDEK	: Undang-Undang Dasar 1945, Sosalisme (ala) Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

CURRICULUM VITAE

Nama : Khusnul Khotimah
Tempat, tgl lahir : Tulung Agung, 10 Agustus 1983
Alamat asal : Jl. Bandung – Prigi RT. 1 RW. 1 Talun Kulon – Bandung –
Tulung Agung
Alamat Yogya : Asrama Al-Hidayah I Jl. Ori I No. 5 Papringan Yogyakarta
Nama Ayah : Musnaini
Nama Ibu : Mujilah
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jl. Bandung Prigi Rt.I, Rw. 1 Talun Kulon – Bandung –
Tulung Agung Jatim

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Talun Kulon – Bandung, tahun 1989 - 1990
2. SDN 1 Talun Kulon – Bandung, tahun 1990 – 1996
3. MTsN Bandung Tulung Agung, tahun 1996 – 1999
4. MTsA Al-Islam Ponorogo, tahun 1999 – 2003
5. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003 – Sekarang

Pengalaman Berorganisasi

1. Wakil Ketua Bagian Keagamaan (Rohis) OSIS MTsN Bandung Tulung Agung
2. Pemangku Adat Dewan Ambalan Koordinator Putri Al-Islam Ponorogo
3. Ketua Putri Andalan Koordinator Al-Islam Ponorogo
4. Ketua Putri Ponpes Darul Hikmah Ponorogo
5. Ketua Putri Konsulat Tulung Agung Al-Islam Ponorogo